



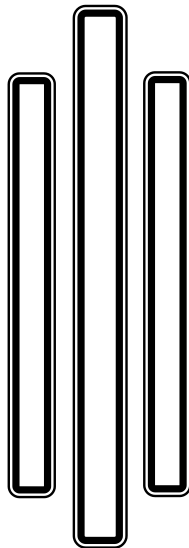
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

RENCANA STRATEGIK KINERJA (RENSTRA)

TAHUN 2018 – 2023

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN SUKAMARA



Sukamara, April 2020

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara oleh Tim Penyusun sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara Tahun 2018 - 2023.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) ini menguraikan tentang latar belakang yang dikemukakan secara ringkas mengenai pengertian Renstra; fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota dan dengan Renja SKPD; landasan hukum serta tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara; tujuan; sasaran dan indikator sasaran serta target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) ini diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 yang lebih akuntabel.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara dan kebijakan Bupati Sukamara.

Semoga Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara 5 (lima) tahun kedepan

Sukamara, 9 April 2020

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sukamara,

The image shows a circular official stamp of the Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA" around the top edge and "BADAN KESBANG DAN POLITIK" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

SUTRISNO, S.Sos

Pembina Tk.I

NIP. 19690918 199012 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Surat Pernyataan Kepala Badan Kesbangpol	iii
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SOPD	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan	25
Pelayanan Perangkat Daerah	
BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	27
PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan	27
Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah	30
dan wakil kepala daerah Terpilih	
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	31
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan	32
Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	33
BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN.....	35
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	35
BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
5.1. Visi Misi Badan Kesbangol Kabupaten Sukamara	39
5.2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	40
BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	42
BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	49
BAB. VIII PENUTUP.....	51



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Tjilik Riwut Km 7 Telp (0532) 26111 Sukamara 74172

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama Sutrisno, S.Sos NIP 19690918 199012 1 003

Jabatan Plt. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Sukamara

Berdasarkan SK Bupati

Nomor 816/46/BKD/2019 tanggal 2 April 2019

Bertugas untuk dan atas nama

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara

Berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km.7 Telp /Fax (0532)
26111 Sukamara 74172

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara, untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023.
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara Tahun 2018 – 2023 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukamara, 9 April 2020

Plt. Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Sukamara

SUTRISNO, S.Sos

Pembina Tk.I

NIP. 19690918 199012 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Rencana Strategis

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen rencana strategik Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Strategis Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah menggambarkan wujud pelayanan yang diberikan Perangkat Daerah kepada masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah juga sebagai tolak ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun, dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program Kepala Daerah.

1.1.2. Fungsi Renstra

Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai :

- a. Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
- d. Sebagai kontrak kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah; dan
- e. Sebagai landasan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.1.3. Proses Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

- a. Persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tahapan persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten.

- 1) Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah
- 2) Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah
- 3) Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra Perangkat Daerah
- 4) Pengumpulan Data dan Informasi

b. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tahap penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah terdiri dari dua tahap, yaitu: 1. Tahap perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah; dan 2. Tahap penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah.

1) Tahap Perumusan Rancangan Renstra

Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra Perangkat Daerah sangat menentukan kualitas dokumen Renstra Perangkat Daerah yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah adalah Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.

Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah dijadikan sebagai kertas kerja (working paper). Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen) Renstra Perangkat Daerah.

2) Tahap Penyajian Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra Perangkat Daerah, sesuai dengan sistematika penulisan.

1.1.4. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

a. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara dengan RPJMD Kabupaten Sukamara sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan :

- 1) Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara sebagai dokumen teknis dalam penjabaran RPJMD.
- 2) Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara memuat visi, misi arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau tugas dan fungsi pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan BAPPEDA.

b. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara dengan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara.

Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara yang disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan dan merupakan kompilasi rencana kerja setiap tahun.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara Tahun 2018 -2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara adalah sebagai dasar bagi semua stakeholder Kesatuan Bangsa dan Politik serta seluruh aparatur di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara dalam melaksanakan program dan kegiatan selama jangka waktu 5 (lima) tahun.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara adalah:

1. Mengetahui kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara dimasa lalu, permasalahan dan isu strategis, sasaran strategis dan bagaimana upaya pencapaiannya dalam lima tahun mendatang;
2. Memandu perencanaan pembangunan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara yang berkelanjutan;
3. Sebagai instrumen bagi pihak-pihak yang bertugas melaksanakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi program dan kegiatan;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SOPD setiap tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah, maka sistematika penulisan naskah rancangan Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk Kabupaten/Kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya serta Identifikasi permasalahan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-

faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SOPD

2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukamara dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sukamara.

Selanjutnya pada tahun 2016 Badan Kesatuan Bangsa mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sukamara.

Adapun yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang di tugaskan kepala daerah.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;

- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 5) Pelaksanaa fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kewenangan

Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan bahan keterangan dan informasi; pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah Kabupaten Sukamara; pengkoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara di wilayah Kabupaten Sukamara; peningkatan kesadaran bela negara, pembentukan dan pengembangan karakter bangsa di wilayah Kabupaten Sukamara; penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di wilayah Kabupaten Sukamara; revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di wilayah Kabupaten Sukamara; pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah Kabupaten Sukamara; penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan, pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan; pendidikan kewarganegaraan, Pancasila, UUD 1945; pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan; pelestarian Bhineka Tunggal Ika; pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme di wilayah Kabupaten Sukamara; pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa dan peningkatan ketahanan dan keutuhan NKRI di wilayah Kabupaten Sukamara;
- 2) Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik di wilayah Kabupaten Sukamara; pemetaan situasi dan kondisi dalam negeri di wilayah Kabupaten Sukamara; peningkatan pemahaman demokrasi Pancasila di wilayah Kabupaten Sukamara; peningkatan partisipasi masyarakat tentang politik di wilayah Kabupaten Sukamara; peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di

wilayah Kabupaten Sukamara; fasilitasi pemahaman mengenai etika dan budaya politik di wilayah Kabupaten Sukamara; penyusunan data dan informasi partai politik di wilayah Kabupaten Sukamara; fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di wilayah Kabupaten Sukamara; verifikasi bantuan keuangan partai politik di wilayah Kabupaten Sukamara; melaksanakan komunikasi politik di wilayah Kabupaten Sukamara; fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri di wilayah Kabupaten Sukamara; verifikasi keberadaan partai politik di wilayah Kabupaten Sukamara; pemantauan pelaksanaan pemilu dan Pemantauan Pemilu presiden dan wakil presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati; pemantauan pelaksanaan pemilu DPR, DPRD, DPD serta pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah Kabupaten Sukamara;

- 3) Pengumpulan bahan keterangan, informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Sukamara; kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Sukamara; monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Sukamara; fasilitasi dan koordinasi penanganan lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah Kabupaten Sukamara; monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro dan mikro yang berdampak pada **Stabilitas** pemerintahan dalam negeri di wilayah Kabupaten Sukamara; melaksanakan koordinasi penanganan penyakit masyarakat di wilayah Kabupaten Sukamara; fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Sukamara; melaksanakan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat NKRI di wilayah Kabupaten Sukamara; melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelestarian Bahasa daerah di wilayah Kabupaten Sukamara; melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme di wilayah Kabupaten Sukamara; penanganan masalah pemerintahan

dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya di wilayah Kabupaten Sukamara; melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Sukamara; melaksanakan pelayanan pendaftaran; pemetaan, pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, lembaga asing serta pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Sukamara;

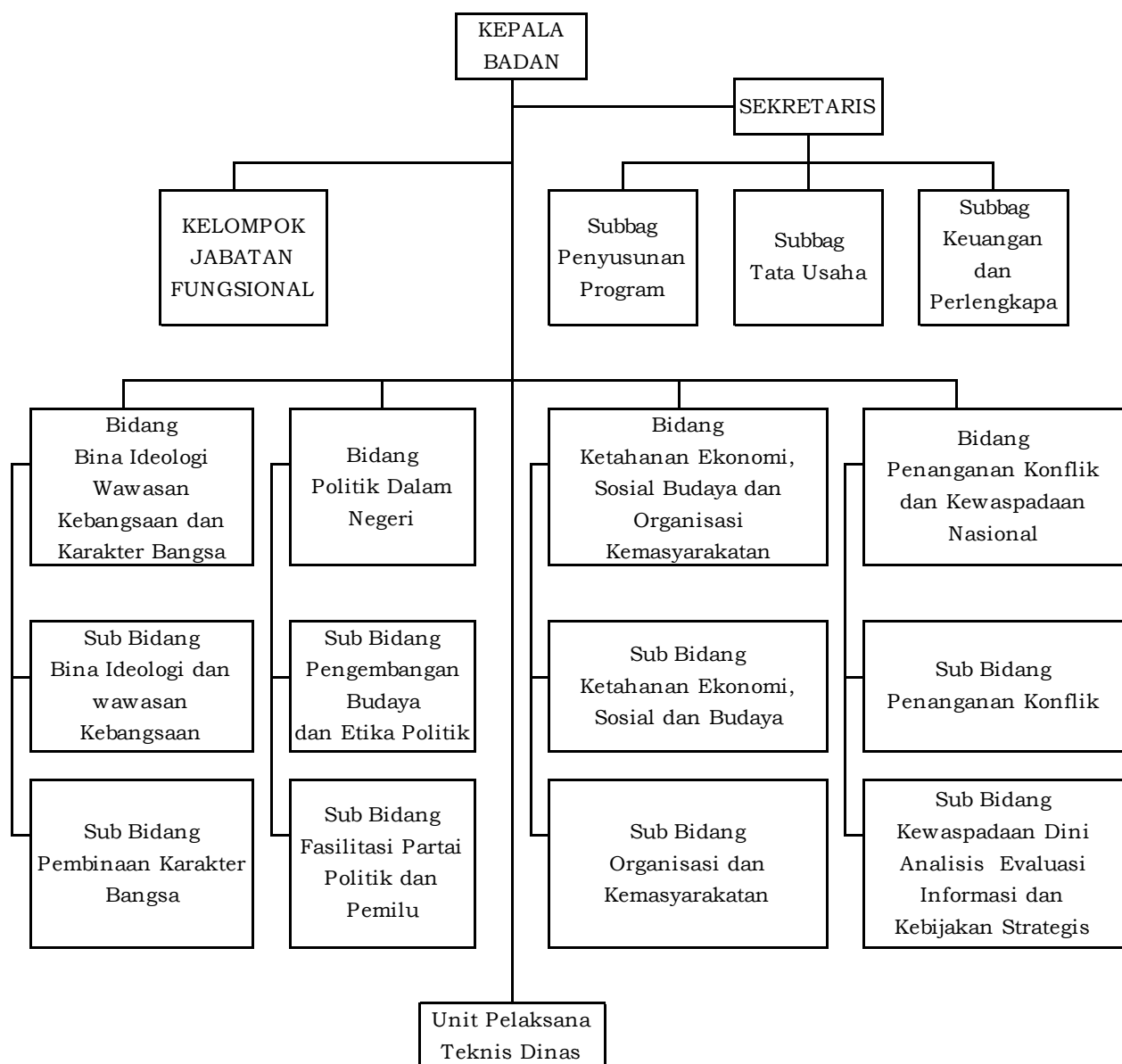
- 4) Pengumpulan bahan keterangan dan informasi bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten Sukamara; pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, keberadaan dan aktifitas orang asing serta pemetaan konflik di wilayah Kabupaten Sukamara; melaksanakan kerjasama **Stabilitas** keamanan, kerjasama dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang intelijen di wilayah Kabupaten Sukamara; melaksanakan deteksi dini di wilayah Kabupaten Sukamara; pengolahan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik; penyeleksian dan pengintegrasian data informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah Kabupaten Sukamara analisis dan penginterpretasian informasi dan kebijakan strategik di wilayah Kabupaten Sukamara; penyusunan hasil menganalisis, mengevaluasi informasi kebijakan strategik kebijakan dan perkiraan keadaan di wilayah Kabupaten Sukamara; peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi di wilayah Kabupaten Sukamara; melaksanakan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM); melaksanakan pemantauan, evaluasi, kerjasama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah Kabupaten Sukamara; melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah Kabupaten Sukamara.

2.1.2 Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara; kemudian Peraturan Bupati Sukamara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan Peraturan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sukamara Nomor : 08.1 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara, maka struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara terdiri atas :

- 1) Kepala Badan ;
- 2) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha;
- 3) Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi :
 - a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa
- 4) Bidang Politik Dalam Negeri membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik;
 - b. Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu.
- 5) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional membawahi :
 - a. Sub Bidang Penanganan Konflik;
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis
- 6) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi :
 - a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - b. Sub Bidang Organisasi dan Kemasyarakatan

**Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Tengah**



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara diklasifikasikan kedalam jenjang minimal SLTA atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan jenjang paling puncak yaitu jenjang Sarjana S1. Komposisi ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 1

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Strata/S2	-	-	-
2	Strata/S1	10	4	14
3	Diploma/D-3	1	-	1
4	SLTA / Sederajat	6	2	8
Total		17	6	23

Dari jumlah 23 orang komposisi ASN berdasarkan kualifikasi pangkat dan golongannya dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 2

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat / Golongan

No	Pangkat / Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Pengatur / II.b	1	-	1
2	Pengatur Tk.I / II.d	2	2	4
3	Penata Muda / III.a	3	-	3
4	Penata Muda Tk.I / III.b	1	-	1
5	Penata / III.c	1	3	4
6	Penata Tk. I / III.d	5	-	5
7	Pembina / IV.a	4	-	4
8	Pembina Tk. I / IV.b	1	-	1
9	Pembina Utama Muda / IV.c	-	-	-
Total		18	5	23

Komposisi ASN berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan
Struktural dan Fungsional Umum

No	Struktural dan Fungsional	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Eselon II.a	-	-	-
2	Eselon III.a	1	-	1
3	Eselon III.b	4	-	4
4	Eselon IV.a	6	4	10
5	Jabatn Fungsional Umum / Pelaksana	6	2	8
Total		17	6	23

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang didalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara. Sarana dan prasarana yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara berasal dari APBD. Sarana dan Prasarana yang dimiliki sampai dengan tahun 2018 pada saat penyusunan RENSTRA ini belum bisa disajikan sehubungan dengan masih disusunnya pelaporan Aset oleh Pengurus Barang dan Bagian Asset BPKAD Kabupaten Sukamara pada laporan ini disajikan keadaan Asset Badan Kesbangpol Tahun 2016 sebagai mana terlampir pada laporan ini :

Tabel 4
Sumber Daya Berupa Sarana dan Prasarana

No	URAIAN	ASET TETAP				JUMLAH ASET TETAP	
		Aset Baik		Aset Kurang Baik			
		Jumlah Item	Jumlah Harga	Jumlah Item	Jumlah Harga	Jumlah Item	Jumlah Harga
1	Tanah	0	-	0	-	0	-
1.1	Tanah	0	-	0	-	0	-
2	Peralatan dan Mesin	65	1.618.603.433,33	0	-	65	1.618.603.433,33
2.1	Alat – alat besar	0	-	0	-	0	-
2.2	Alat – alat Angkutan	2	323.959.000	0	-	2	323.959.000
2.3	Alat Bengkel dan Alat	0	-	0	-	0	-
2.4	Alat Pertanian	0	-	0	-	0	-
2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	52	1.090.496.433,33	0	-	52	1.090.496.433,33
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	10	172.750.000	0	-	10	172.750.000
2.7	Alat – alat kedokteran	0	-	0	-	0	-
2.8	Alat Laboratorium	1	31.398.000	0	-	1	31.398.000
2.9	Alat – alat persenjataan dan keamanan	0	-	0	-	0	-
3	Gedung dan Bangunan	6	1.648.077.499	0	-	6	1.648.077.499
3.1	Bangunan Gedung	6	1.648.077.499	0	-	6	1.648.077.499
3.2	Monumen	0	-	0	-	0	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	-	0	-	0	-
4.1	Jalan dan Jembatan	0	-	0	-	0	-
4.2	Bangunan Air/Irigasi	0	-	0	-	0	-
4.3	Instalasi	0	-	0	-	0	-
4.4	Jaringan	0	-	0	-	0	-
5	Aset Tetap Lainnya	1	2.920.000	0	-	1	2.920.000
5.1	Buku dan Perpustakaan	1	2.920.000	0	-	1	2.920.000
5.2	Barang bercorak kebudayaan	0	-	0	-	0	-
5.3	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0	-	0	-	0	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	-	0	-	0	-
6.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	-	0	-	0	-
TOTAL		72	3.269.600.932,33	0	-	72	3.269.600.932,33

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Satuan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri).

Berdasarkan acuan tersebut terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri yaitu :

1. Kegiatan pembinaan partai politik (menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik di daerah);
2. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP).

Secara ringkas capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara sampai tahun 2018 adalah sebagai berikut :

2.3.1 Kegiatan Pembinaan Partai Politik

Kegiatan pembinaan terhadap partai politik di Kabupaten Sukamara yang telah dilakukan sampai tahun 2018 berjumlah 4 kegiatan, sedangkan target yang tertuang di Renstra Perangkat Daerah adalah 5 kegiatan. Apabila diukur persentasenya maka pencapaian kinerja pelayanan Satuan Organisasi Perangkat Daerah dalam kegiatan pembinaan partai politik ini adalah 80%, dari target IKK pada akhir periode Renstra sebesar 100%.

Memperhatikan persentase capaian kinerja pelayanan pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut, maka kegiatan pembinaan partai politik di Kabupaten Sukamara dinilai kurang berhasil mencapai target dalam periode Renstra periode 2013-2018.

2.3.2 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP.

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP di Kabupaten Sukamara yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai akhir periode Renstra berjumlah 3 Kegiatan, sedangkan target yang tertuang di Renstra Perangkat Daerah adalah 5 kegiatan. Apabila diukur persentasenya maka pencapaian kinerja pelayanan Satuan Organisasi Perangkat

Daerah dalam kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP di Kabupaten Sukamara ini adalah 60%, dari target IKK pada akhir periode Renstra sebesar 100%.

Tidak tercapainya target kinerja pelayanan pada akhir periode Renstra tersebut juga disebabkan minimnya anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan pembinaan LSM, Ormas dan OKP di Kabupaten Sukamara. Masing-masing kegiatan yang dituangkan dalam Renja Satuan Organisasi Perangkat Daerah hanya dapat dilaksanakan 1 kali kegiatan pembinaan dalam setahun, sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak bisa maksimal dilakukan, sementara jumlah LSM, Ormas dan OKP mengalami dinamika peningkatan jumlah dari tahun ke tahun dan harus mendapatkan pembinaan. Data sampai dengan tahun 2017 jumlah LSM, Ormas dan OKP di Kabupaten Sukamara yang terdaftar berjumlah 39 Ormas / LSM dan OKP.

Pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 5
Pencapaian Kinerja Pelayanan SOPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sukamara

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah kegiatan pembinaan politik	5 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan
2	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	5 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan

2.3.3 Keuangan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara didalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas perlu didukung dengan adanya anggaran yang memadai sehingga sasaran dan target dari program dan kegiatan dapat tercapai secara maksimal. Anggaran yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara hanya bersumber dari APBD Kabupaten Sukamara. Berikut adalah pagu anggaran yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara dari 5 tahun terakhir :

Tabel 6
Rekapitulasi Pagu Anggaran Murni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara Tahun 2014– 2018

No	Tahun	Pagu		Total Pagu per Tahun (Rp)
		BTL (Rp)	BL (Rp)	
1	2014	1.386.000.504,49	3.539.561.070,00	4.925.561.574,49
2	2015	1.165.060.658,00	4.317.416.416,00	5.482.477.074,00
3	2016	1.358.165.418,00	5.189.733.800,00	6.547.899.218,00
4	2017	2.242.132.797,00	1.659.509.187,84	3.901.641.984,84
5	2018	2.242.132.797,00	1.659.509.187,84	3.901.641.984,84

Tabel. 7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sukamara

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata – rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	519.659.870	674.024.645	747.787.800	684.416.187,84	465.471.373,00	466.198.046	616.657.714	727.026.883	665.067.278	431.243.500,00	53.461.824	57.366.931	20.760.917	19.348.910	34.227.873	2.718.982.777	2.561.198.621
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.420	625.000	100.000	200.000	100.000	70.500	52.500	66.500	-	-	429.920	572.500	33.500	200.000	100.000	1.445.420	189.500
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	34.200.000	61.800.000	42.600.000	43.800.000	48.600.000	31.077.356	37.297.696	39.912.178	40.898.372	36.065.788	3.122.644	24.502.304	2.687.822	2.901.628	12.534.212	192.120.000	156.398.760
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.300.000	24.410.000	-	-	-	12.550.000	22.200.000	-	-	-	4.750.000	2.210.000	-	-	-	41.710.000	34.750.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	13.600.000	13.600.000	13.600.000	1.800.000	1.800.000	7.923.000	1.453.200	8.396.100	1.619.800	1.413.700	5.677.000	12.146.800	5.203.900	180.200	386.300	42.960.000	19.674.840
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	90.780.000	96.730.000	121.310.000	116.410.000	118.610.000	89.620.000	96.310.000	120.000.000	111.490.000	113.440.000	1.160.000	420.000	1.310.000	4.920.000	5.170.000	448.952.000	440.108.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9.052.800	8.792.800	8.792.800	8.792.800	8.792.800	7.726.300	8.662.800	8.788.900	8.580.000	8.690.000	1.326.500	130.000	3.900	212.800	102.800	37.189.760	35.496.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	32.772.000	33.775.750	32.500.000	32.500.000	25.000.000	32.771.500	33.653.750	32.424.500	32.497.500	24.986.500	500	122.000	75.500	2.500	13.500	136.547.750	136.344.550
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.774.900	32.774.900	27.125.000	26.200.000	11.950.000	25.562.900	31.309.200	27.099.300	25.752.900	11.454.900	7.212.000	1.465.700	25.700	447.100	495.100	121.264.800	112.015.280
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.858.750	5.760.000	5.760.000	5.760.000	5.760.000	8.896.890	4.721.600	5.757.700	5.754.000	5.758.000	1.961.860	1.038.400	2.300	6.000	2.000	29.290.750	26.281.790
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peraturan Peundang-undangan	4.836.000	4.836.000	15.840.000	15.840.000	15.840.000	3.960.000	3.960.000	15.840.000	15.840.000	15.840.000	876.000	876.000	-	-	-	44.520.000	42.768.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	390.000	340.000	200.000	190.000	10.400.000	130.000	170.000	180.000	-	-	260.000	170.000	20.000	190.000	10.400.000	3.200.000	480.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	39.660.000	55.290.000	70.560.000	25.500.000	25.650.000	35.300.000	44.435.000	63.990.000	16.970.000	23.025.000	4.360.000	10.855.000	6.570.000	8.530.000	2.625.000	196.140.000	165.300.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	160.000.000	231.290.000	301.000.000	286.438.387,84	50.000.000	137.909.600	230.066.968	297.411.705	285.984.706	49.965.612	22.090.400	1.223.032	3.588.295	453.682	34.388	988.728.387,84	961.366.101
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Kegiatan (Honor Kontrak)	43.200.000	48.680.000	54.000.000	83.500.000	126.800.000	43.200.000	47.880.000	53.700.000	82.880.000	126.794.000	-	800.000	300.000	620.000	6.000	254.740.000,00	253.018.800
Fasilitasi Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi dalam daerah	29.735.000	55.320.195	54.400.000	37.485.000	16.168.573	29.500.000	54.485.000	53.460.000	36.800.000	13.810.000	235.000	835.195	940.000	685.000	2.358.573	180.173.910	177.007.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	276.270.000	105.961.250	98.520.000	99.986.600	379.315.000	248.132.800	94.378.500	72.533.200	90.260.950	-	28.137.200	11.582.750	25.986.800	9.725.650	379.315.000	656.600.850	505.305.450
Pengadaan peralatan gedung kantor	36.175.000	10.161.250	-	-	4.325.000	34.925.000	9.750.000	-	-	-	1.250.000	411.250	-	-	4.325.000	47.201.250	44.675.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	41.600.000	30.000.000	17.300.000	14.446.600	41.350.000	37.009.800	29.726.000	17.150.000	14.350.000		4.590.200	274.000	150.000	96.600	41.350.000	111.616.600	98.235.800
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas /operasional	65.800.000	65.800.000	81.220.000	67.740.000	86.590.000	44.583.000	54.902.500	55.383.200	58.190.950		21.217.000	10.897.500	25.836.800	9.549.050	86.590.000	297.878.000	213.059.650

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata – rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pembangunan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Mobil Jabatan	-	-	-	-	232.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232.250.000	46.450.000	-
Pengadaan meubeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	-	26.175.000	-	17.500.000	21.675.000	-	26.175.000	-	16.250.000	19.575.000	-	-	-	1.250.000	2.100.000	48.010.000	46.340.000
Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	-	26.175.000	-	17.500.000	-	-	26.175.000	-	16.250.000	-	-	-	-	1.250.000	-	43.675.000	42.425.000
Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu	-	-	-	-	21.675.000	-	-	-	-	19.575.000	-	-	-	-	2.100.000	4.335.000	3.915.000
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	-	105.037.000	22.872.500	81.027.500	31.455.000	-	86.076.000	19.252.500	77.219.400	28.981.800	-	18.961.000	3.620.000	3.808.100	2.473.200	215.228.000	188.344.260
Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	-	67.851.000	-	50.275.000	-	-	48.890.000	-	48.145.000	-	-	18.961.000	-	2.130.000	-	118.126.000	97.035.000
Peningkatan pemahaman bela negara bagi pelajar	-	37.186.000	22.872.500	30.752.500	-	-	37.186.000	19.252.500	29.074.400	-	-	-	3.620.000	1.678.100	-	90.811.000	85.512.900
Pengembangan Forum Pembauran Kebangsaan	-	-	-	-	31.455.000	-	-	-	-	28.981.800	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	52.850.000	62.850.000	46.000.000	37.500.000	43.000.000	42.296.700	37.470.200	31.479.601	29.655.600	28.173.825	10.553.300	25.379.800	14.520.399	7.844.400	14.826.175	207.800.000	146.536.866
Pendidikan dan pelatihan formal	52.850.000	62.850.000	46.000.000	37.500.000	43.000.000	42.296.700	37.470.200	31.479.601	29.655.600	28.173.825	10.553.300	25.379.800	14.520.399	7.844.400	14.826.175	207.800.000	146.536.866
PROGRAM PENINGKATAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	699.732.500	817.541.600	25.224.000	35.200.000	-	592.711.000	251.898.800	13.082.500	28.800.000	-	107.021.500	565.642.800	12.141.500	6.400.000	-	1.577.698.100	886.492.300
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	319.267.500	394.080.600	-	-	-	290.768.500	185.153.800	-	-	-	28.499.000	208.926.800	-	-	-	713.348.100	475.922.300
Pengendalian Keamanan Lingkungan	314.740.000	411.766.000	-	-	-	245.840.000	59.750.000	-	-	-	68.900.000	352.016.000	-	-	-	726.506.000	305.590.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	65.725.000	11.695.000	25.224.000	35.200.000	-	56.102.500	6.995.000	13.082.500	28.800.000	-	9.622.500	4.700.000	12.141.500	6.400.000	-	137.844.000	104.980.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	-	-	-	-	12.025.000	-	-	-	-	9.170.000	-	-	-	-	2.855.000	2.405.000	1.834.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	-	-	12.025.000	-	-	-	-	9.170.000	-	-	-	-	2.855.000	2.405.000	1.834.000
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	275.256.700	286.190.356	248.255.000	263.290.900	201.530.000	245.903.700	273.947.000	236.173.500	254.229.900	162.712.400	29.353.000	12.243.356	12.081.500	9.061.000	38.817.600	1.113.298.956	1.042.796.580
Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Kewaspadaan Dini	92.162.000	-	-	-	-	78.979.000	-	-	-	-	13.183.000	-	-	-	-	92.162.000	78.979.000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	140.042.700	-	-	-	-	133.199.700	-	-	-	-	6.843.000	-	-	-	-	140.042.700	133.199.700

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata – rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	-	70.321.500	77.550.000	76.775.900	72.600.000	-	66.520.000	76.122.400	76.171.900	70.067.400	-	3.801.500	1.427.600	604.000	2.532.600	239.167.400	232.827.780
Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)	-	105.044.356	80.750.000	89.580.000	72.500.000	-	99.128.000	73.542.200	83.620.000	62.200.000	-	5.916.356	7.207.800	5.960.000	10.300.000	289.874.356	268.730.200
Pengendalian dan Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan Orang Asing	25.682.000	17.454.500	20.275.000	34.175.000	-	18.455.000	16.895.000	17.630.000	33.415.000	-	7.227.000	559.500	2.645.000	760.000	-	97.586.500	86.395.000
Penanganan Gangguan Keamanan di Daerah	17.370.000	93.370.000	69.680.000	62.760.000	56.430.000	15.270.000	91.404.000	68.878.900	61.023.000	30.445.000	2.100.000	1.966.000	801.100	1.737.000	25.985.000	254.466.000	242.664.900
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	303.700.000	371.006.065	239.057.500	341.902.500	194.290.000	255.900.800	338.755.000	226.566.500	251.934.400	186.443.200	47.799.200	32.251.065	12.491.000	89.968.100	7.846.800	1.294.524.065	1.110.445.340
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	114.300.000	98.337.380	64.300.000	108.500.000	63.725.000	86.572.000	90.355.500	63.784.000	72.092.400	57.376.600	27.728.000	7.981.880	516.000	36.407.600	6.348.400	398.182.380	324.279.220
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai budaya bangsa	118.470.000	142.590.000	150.335.000	200.305.000	95.765.000	111.678.000	128.581.000	139.315.000	149.325.000	95.339.750	6.792.000	14.009.000	11.020.000	50.980.000	425.250	630.853.000	547.966.950
Peningkatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	70.930.000	130.078.685	24.422.500	33.097.500	34.800.000	57.650.800	119.818.500	23.467.500	30.517.000	33.726.850	13.279.200	10.260.185	955.000	2.580.500	1.073.150	265.488.685	238.199.170
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	53.575.000	116.086.500	79.135.000	98.687.500	166.825.000	39.825.000	109.942.000	68.785.500	90.888.000	157.460.688	13.750.000	6.144.500	10.349.500	7.799.500	9.364.312	380.849.000	340.932.638
Penyusunan data base partai politik	17.425.000	-	-	-	-	15.140.000	-	-	-	-	2.285.000	-	-	-	-	17.425.000	15.140.000
Penyuluhan kepada masyarakat	-	97.495.000	67.785.000	67.737.500	158.875.000	-	95.277.000	57.447.500	63.408.000	150.925.688	-	2.218.000	10.337.500	4.329.500	7.949.312	264.792.500	246.317.638
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	18.591.500	11.350.000	30.950.000	7.950.000	-	14.665.000	11.338.000	27.480.000	6.535.000	-	3.926.500	12.000	3.470.000	1.415.000	62.481.500	54.790.000
Sosialisasi dan penyuluhan dalam peningkatan kesadaran demokrasi rakyat	36.150.000	-	-	-	-	24.685.000	-	-	-	-	11.465.000	-	-	-	-	36.150.000	24.685.000
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	2.577.736.000	3.298.957.000	7.192.419.000	-	-	2.183.835.000	2.841.383.500	6.567.617.200	-	-	393.901.000	457.573.500	624.801.800	-	-	13.069.112.000	11.592.835.700
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	70.748.000	206.131.000	173.345.000	-	-	57.835.000	151.618.500	140.330.000	-	-	12.913.000	54.512.500	33.015.000	-	-	450.224.000	349.783.500
PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	1.253.494.000	1.546.413.000	3.509.537.000	-	-	1.063.000.000	1.344.882.500	3.213.643.600	-	-	190.494.000	201.530.500	295.893.400	-	-	6.309.444.000	5.621.526.100
Peningkatan kesegiaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1.253.494.000	1.546.413.000	3.509.537.000	-	-	1.063.000.000	1.344.882.500	3.213.643.600	-	-	190.494.000	201.530.500	295.893.400	-	-	6.309.444.000	5.621.526.100

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Penataan kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sukamara menuntut seluruh pegawai untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada.

Hal ini merupakan sebuah keharusan karena dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dibutuhkan kemampuan dan kemauan setiap instansi pemerintah untuk terus menerus melakukan perubahan dan penyesuaian sebagai akibat perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi yang sangat dinamis agar keberadaan organisasi tetap, berarti dan bahkan unggul.

Peran, fungsi dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara saat ini dirasakan semakin kompleks. Tuntutan terhadap kinerja yang lebih baik, selain kegiatan fasilitasi, mediasi dan komunikasi yang telah dilaksanakan selama ini juga terus meningkat untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri, hasil telaahan terhadap RTRW Kabupaten Sukamara, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Satuan Organisasi Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, berikut dikemukakan peluang dan tantangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara :

1. Tantangan

Tantangan dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara :

- a. Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai dan andal di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- b. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik belum optimal.
- c. Belum seragamnya struktur organisasi dan tata kerja bidang kesatuan bangsa dan politik antara kabupaten/kota dan provinsi.
- d. Wacana menjadikan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik menjadi urusan pusat/instansi vertikal.

2. Peluang

Peluang dalam pengembangan pelayanan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara :

- a. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam sistem politik Indonesia yang lebih demokratis melalui penataan sistem pemerintah daerah, penyempurnaan paket undang-undang politik serta penyelenggaraan sistem pemilu kepala daerah serentak.
- b. Pemerintah Kabupaten Sukamara menetapkan wilayah Kabupaten Sukamara sebagai Bumi Pancasila.
- c. Pemerintah Pusat telah menetapkan urusan kesatuan bangsa dan politik menjadi urusan vertikal.
- d. Adanya forum-forum binaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi di bidang kesatuan bangsa dan politik maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis. Dari permasalahan tersebut akhirnya dapat disusun Visi dan Misi dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara.

Sesuai telaahan dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L dan Kabupaten/Kota, Implikasi dari RTRW dan KLHS, dapat dirumuskan isu-isu penting/strategis sebagai berikut:

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara, beberapa hasil identifikasi permasalahan yang terdapat di Kabupaten Sukamara antara lain sebagai berikut :

Tabel 8
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Ketahanan Ideologi Negara	1. Menurunnya kebanggaan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. 2. Adanya kontroversi terhadap penyebutan Pancasila sebagai salah satu pilar, padahal Pancasila merupakan dasar/filosofi bangsa (Philosophische grondslag)	Kurangnya sosialisasi terhadap nilai-nilai luhur Pancasila, sehingga dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi kontroversi dikalangan masyarakat biasa
2.	Wawasan Kebangsaan	Merosotnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan dikalangan masyarakat.	Minimnya wawasan kebangsaan
3.	Bela Negara	Merosotnya semangat persatuan dan kesatuan kebangsaan dikalangan masyarakat.	Kurangnya kesadaran bela negara untuk hakikatnya bersedia berbakti pada negara

4.	Nilai-nilai Sejarah Bangsa	Terjadinya pergeseran nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat dikarenakan melupakan sejarah perjalanan perjuangan bangsa.	Diakibatkan karena : a. Kemajuan teknologi. b. Memudarnya kualitas keimanan. c. Pengaruh lingkungan d. Hilangnya kejujuran. e. Hilangnya rasa tanggung jawab. f. Tidak berfikir jauh kedepan. g. Rendahnya disiplin.
5.	Pembauran dan Kewarganegaraan	Masih terdapatnya isu-isu yang bernuansa SARA dan tindakan diskriminatif terhadap warganegara yang bertentangan dengan hak-hak sipil sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.	Kurangnya pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap semboyan Bineka Tunggal Ika
6.	Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rawan terjadinya konflik antar suku karena banyaknya warga pendatang dari berbagai daerah. 2. Rawan terjadinya konflik antara warga lokal dengan perusahaan perkebunan dan perusahaan - perusahaan akibat adanya pembukaan lahan yang mencaplok dan merusak lahan warga dan tanah adat. 3. Masih tingginya tindak kriminalitas dilingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga. 4. Rendahnya kepekaan, kesiagaan dan antisipasi serta peran serta masyarakat dalam urusan keamanan, ketenteraman dan ketertiban. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. warga pendatang kurang bersosialisasi dengan warga setempat 2. Perusahaan kurang terbuka dengan masyarakat dalam penggunaan tanah untuk perkebunan 3. Pengetahuan dan rasa kepedulian terhadap lingkungan masih rendah. 4. Kebersamaan dalam menjaga lingkungan masih rendah.

7.	Politik Negeri	Dalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam bidang politik. 2. Berkurangnya pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban dalam proses demokratisasi. 3. Kerawanan / konflik dalam proses penyelenggaraan Pilkada serentak. 	Masih rendahnya Sumber Daya Manusia
8.	Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerawanan Ketahanan Ekonomi masyarakat dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). 2. Bergesernya norma-norma sosial dan Terkikisnya kebudayaan daerah di kalangan masyarakat. 3. Kerawanan terjadinya konflik antar umat beragama / SARA di wilayah Kabupaten Sukamara 4. Kerawanan penanganan masalah ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Sukamara. 5. Kerawanan penyakit masyarakat yang berdampak pada Stabilitas ketahanan Nasional di Kabupaten Sukamara. 6. Kurangnya pemahaman terhadap organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Sukamara. 	

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023, maka Visi RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023 adalah ”**TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUKAMARA YANG SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT, DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL**”.

Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (Lima) Misi sebagai berikut :

1. Membangun manajemen pemerintahan yang profesional, bersih dan demokratis berbasis pelayanan prima kepada masyarakat
2. Mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Sukamara yang terdidik dan sehat
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur secara terarah, terukur dan berkeadilan
4. Mendorong kemandirian ekonomi yang berbasis sumber daya alam lokal (Pertanian, Perikanan, Industri dan Pariwisata) dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup
5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat menuju kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Misi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sukamara yang berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara adalah ”**Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat menuju kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis**”

Berdasarkan misi tersebut ditetapkan Sasaran Pembangunan Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan sebagai berikut :

1. Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan khususnya para penegak hukum
2. Terwujudnya sinergi pembangunan antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat
3. Terwujudnya pembangunan daerah yang mengutamakan kesetaraan dan gender serta ramah perempuan dan anak
4. Terwujudnya masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya

5. Terwujudnya agama sebagai sebuah nilai dalam kehidupan bermasyarakat.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia

Beberapa permasalahan dan tantangan ke depan yang masih perlu disikapi yang terkait dengan tugas Kementerian Dalam Negeri, 2 diantaranya yaitu :

1. Relatif rendahnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, UUD 1945, ke-bhinekaan, NKRI, demokratisasi, revolusi karakter bangsa, dan restorasi sosial budaya serta stabilitas dalam negeri, dalam rangka memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan.
2. Belum tertatanya struktur politik (suprastruktur dan infrastruktur politik), pemantapan budaya politik, dinamika politik dalam negeri, dan hubungan antar lembaga negara, dalam rangka mewujudkan politik dalam negeri yang lebih demokratis.

Menyikapi permasalahan tersebut maka Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: ***“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”***.

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerjayang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri yang terkait permasalahan tersebut, yaitu Misi Pertama dan Misi Kedua sebagai berikut :

- a. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
- b. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.

Tabel 9
Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

No	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penanganan Konflik Sosial	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;	Masih banyak terjadinya konflik sosial yang diakibatkan dari beberapa permasalahan	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sukamara, perlu didukung oleh terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Sukamara, sehingga Kerukunan dan Kedamaian Masyarakat akan dapat terpelihara dengan baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Tata ruang wilayah dan lingkungan hidup memiliki pengaruh terhadap struktur sosial dan budaya masyarakat setempat, dengan demikian sangatlah sulit untuk merubah pola kehidupan masyarakat yang sudah mengakar dengan nilai-nilai dan norma sosial budaya masyarakat yang berbeda dengan mengandalkan sifat-sifat kedaerahannya masing-masing. Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya benturan kelompok kepentingan dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara kedepan berusaha untuk meningkatkan Kerukunan dan kedamaian masyarakat secara efektif dan efisien.

Luasnya wilayah Kabupaten Sukamara menjadi kendala bagi pemerintah dalam memantau dan memonitor daerah-daerah tertentu yang dimungkinkan terjadinya ketidak harmonisan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian setidaknya untuk memperkecil resiko konflik dalam masyarakat dapat diminimalisir dengan memberikan pendidikan politik, peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan, bela negara, pencegahan tindak kriminal, pembauran dan deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat utama bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu upaya dan langkah untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa perlu senantiasa dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi. Secara obyektif bangsa Indonesia dibangun diatas kemajemukan sehingga berpotensi terhadap kerawanan sosial, politik, dan kewilayahan yang dapat mengarah timbulnya konflik sosial yang berdimensi horizontal maupun vertikal. Selain kemajemukan masyarakat Indonesia yang rawan konflik, masih terdapat beberapa permasalahan lainnya yang satu sama lain saling mengait seperti implementasi otonomi daerah yang belum tuntas, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi, serta rendahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum yang merupakan hambatan yang signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan berpotensi terhadap disintegrasi bangsa.

Disamping fenomena faktual tersebut di atas, kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan pada kurangnya kesadaran demokrasi dan berpolitik serta kelestarian lingkungan sehingga berpengaruh terhadap semakin merosotnya indeks pembangunan manusia yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor ancaman dalam perwujudan ketahanan bangsa dan kehidupan masyarakat. Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Kabupaten Sukamara, dapat dikemukakan beberapa masalah yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara, yaitu :

1. Pendidikan politik masyarakat masih rendah

Dapat dilihat dari menurunnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilukada di Kabupaten Sukamara serta konflik-konflik yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilukada.

2. Harmonisasi kehidupan bermasyarakat cenderung menurun

Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan semakin maraknya conflict and communal violence (konflik dan kekerasan komunal) di tengah masyarakat, seperti tawuran antar warga dan pertentangan antar komunitas/kelompok masyarakat.

3. Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat

Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya, dan ekonomi memunculkan eksese-eksese negatif dengan munculnya modus- modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional dan transnasional.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

a. Tujuan

Dalam menentukan tujuan dan sasaran maka yang perlu dipertimbangkan adalah visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Adapun tujuan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara 2018-2023 berdasarkan misi yang telah disusun adalah sebagai berikut:

1. Misi Kelima : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat menuju kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.

Tujuan Misi Kelima adalah :

- Mewujudkan Sukamara yang aman, tertib dan inklusif.
- Menjadikan Sukamara sebagai daerah yang menghargai dan menghormati keanekaragaman sosial, agama dan ras.
- Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Sasaran

Sebagai derivasi dari tujuan tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara, selanjutnya menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2018-2023, yaitu :

1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
2. Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
3. Keamanan, ketentraman dan pencegahan kejahatan.
4. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
5. Wawasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dalam bingkai demokrasi guna terciptanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
6. Pemahaman masyarakat tentang ekonomi hijau dan peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya daerah.
7. Pemahaman Masyarakat tentang kerukunan Umat Beragama.
8. Pemahaman masyarakat tentang organisasi kemasyarakatan/LSM dan OKP.

Tabel 10
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Melaksanakan administrasi perkantoran	Administrasi perkantoran Badan Kesbangpol	Meningkatnya cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Sarana dan prasarana aparatur Badan	Meningkatnya cakupan layanan sarana dan	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatkan disiplin aparatur	Tingkat disiplin aparatur Badan Kesbangpol	Meningkatnya kepatuhan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	PNS di Badan Kesbangpol	Meningkatnya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi di bidangnya	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan	Laporan capaian kinerja dan laporan keuangan Badan Kesbangpol	Meningkatnya pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Meningkatkan pengelolaan aset/barang milik daerah	Aset / barang milik daerah di Badan Kesbangpol Sukamara	Meningkatnya pengelolaan aset/barang milik daerah di Badan Kesbangpol Kabupaten Sukamara	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Terciptanya dan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Terpeliharanya dan pencegahan kejahatan secara dini	Keamanan, ketentraman dan pencegahan kejahatan	Meningkatnya kerjasama dengan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan	100%	100%	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Pemantauan dan Pelaporan Potensi Konflik Sosial	Pelaporan Potensi Konflik Sosial	Pelaksanaan Pemantauan dan Pelaporan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kab. Sukamara	20%	20%	20%	20%	20%
10.	Menguatnya rasa cinta terhadap tanah air, bangsa dan negara Indonesia	Rasa persatuan dan kesatuan, cinta tanah air dan bela negara di	Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan NKRI masyarakat di Kabupaten	42,12%	14,47%	14,47%	14,47%	14,47%
11.	Mengembangkan wawasan Kebangsaan di Kab Sukamara	Wawasan kebangsaan masyarakat di Kabupaten Sukamara	Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat	17,44%	23,84%	17,44%	23,84%	17,44%
12.	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi hijau	Pemahaman masyarakat tentang ekonomi hijau	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi hijau	10,34%	34,48%	10,34%	34,48%	10,34%
13.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya daerah serta pemahaman masyarakat tentang organisasi	Pemahaman masyarakat tentang organisasi kemasyarakatan / LSM dan OKP	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang organisasi kemasyarakatan/LSM dan OKP	21,21%	15,15%	21,21%	21,21%	21,21%
14.	Meningkatnya wawasan dan pemahaman politik yang sehat bagi masyarakat	Wawasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dalam bingkai demokrasi guna terciptanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan berpolitik	20%	20%	20%	20%	20%
15.	Termonitornya Pelaksanaan Pileg / Pilpres / Pilkada di Kabupaten Sukamara	Pelaksanaan Pileg/Pilpres / Pilkada	Pelaporan hasil Pelaksanaan Pileg/Pilpres / Pilkada	36%	0%	28%	0%	36%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan visi dan misi Bupati Sukamara yang terpilih serta memperhatikan tantangan dan peluang serta serta isu-isu strategis yang telah ditentukan dalam bab sebelumnya, maka dirumuskan tujuan dan upaya yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara selama 5 (lima) tahun ke depan yang dituangkan dalam Visi dan Misi sebagai berikut :

5.1 Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara Periode 2018 - 2023 adalah “ **Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Di Kabupaten Sukamara Dengan Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa** ”.

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi badan Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri

Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

2. Menegakkan Demokrasi

Dapat dimaknai bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.

3. Menjaga Integrasi Bangsa

Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Sukamara.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas di Kabupaten Sukamara.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Meningkatkan wawasan dan pemahaman politik masyarakat.
4. Meningkatkan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya daerah dan organisasi kemasyarakatan.

5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 11
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Di Kabupaten		
Misi I : Membangun manajemen pemerintahan yang profesional, bersih dan demokratis		
Tujuan	Sasaran	Strategi / Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dalam menyelenggarakan	1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat
Misi II : Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam menciptakan		
1. Meningkatnya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	1. Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	1. Menciptakan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum
2. Terpeliharanya keamanan, ketentraman dan pencegahan kejahatan	2. Keamanan, ketentraman dan pencegahan kejahatan	2. Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	3. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	3. Meningkatkan peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta aparatur kesbangpol dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban umum
Misi II : Meningkatkan wawasan dan pemahaman politik masyarakat		
1. Meningkatnya wawasan dan pemahaman politik yang sehat bagi masyarakat	1. Wawasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dalam bingkai demokrasi guna terciptanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	1. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat
Misi IV : Meningkatkan ketahanan ekonomi, ketahanan Sosial Budaya dan Organisasi		
1. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi hijau, sumber daya alam dan peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya daerah.	1. Pemahaman masyarakat tentang ekonomi hijau dan peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya daerah	1. Memberikan pemahaman tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam penerapan ekonomi hijau, penanganan kesenjangan ekonomi, serta peran serta masyarakat dalam memelihara ketahanan sosial dan budaya daerah
2. Terpeliharanya kerukunan umat beragama	2. Pemahaman Masyarakat tentang kerukunan Umat Beragama	2. Meningkatkan peran serta tokoh agama dalam rangka Kerukunan antar umat beragama
3. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang organisasi kemasyarakatan	3. Pemahaman masyarakat tentang organisasi kemasyarakatan/LSM dan OKP	3. Memberikan pembinaan kepada pengurus Ormas/LSM dan OKP

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu 5 (lima) tahun (2018-2023) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara yang akan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023.

Rencana program dan kegiatan tersebut sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 12
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sukamara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Melaksanakan administrasi perkantoran	Administrasi perkantoran Badan Kesbangpol	1.19.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya cakupan layanan administrasi perkantoran		100,00 %	869.200.000	100,00 %	869.200.000	100,00 %	869.200.000	100,00 %	869.200.000	100,00 %	869.200.000	100,00 %	4.346.000.000	Badan Kesbangpol	Sukamara
		1.19.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Pengiriman surat/Paket melalui Jasa Kurir		100 Surat	300.000	100 Surat	300.000	100 Surat	300.000	100 Surat	300.000	100 Surat	300.000	500 Surat	1.500.000	Badan Kesbangpol	Sukamara
		1.19.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayar		36 Rekening	60.000.000	36 Rekening	60.000.000	36 Rekening	60.000.000	36 Rekening	60.000.000	36 Rekening	60.000.000	180 Rekening	300.000.000	Badan Kesbangpol	Sukamara
		1.19.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional		18 Unit	5.000.000	18 Unit	5.000.000	18 Unit	5.000.000	18 Unit	5.000.000	18 Unit	5.000.000	90 Unit	25.000.000	Badan Kesbangpol	Sukamara
		1.19.01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola keuangan dan barang		25 Orang	150.000.000	25 Orang	150.000.000	25 Orang	150.000.000	25 Orang	150.000.000	25 Orang	150.000.000	25 Orang	750.000.000	Badan Kesbangpol	Sukamara
		1.19.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kebersihan		25 Jenis	9.000.000	25 Jenis	9.000.000	25 Jenis	9.000.000	25 Jenis	9.000.000	25 Jenis	9.000.000	125 Jenis	45.000.000	Badan Kesbangpol	Sukamara
		1.19.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor		35 Jenis	40.000.000	35 Jenis	40.000.000	35 Jenis	40.000.000	35 Jenis	40.000.000	35 Jenis	40.000.000	175 Jenis	200.000.000	Badan Kesbangpol	Sukamara
		1.19.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dokumen yang digandakan		12 jenis dokumen	25.000.000	12 jenis dokumen	25.000.000	12 jenis dokumen	25.000.000	12 jenis dokumen	25.000.000	12 jenis dokumen	25.000.000	60 jenis dokumen	125.000.000	Badan Kesbangpol	Sukamara
		1.19.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen penerangan		20 Jenis Komponen	7.500.000	20 Jenis Komponen	7.500.000	20 Jenis Komponen	7.500.000	20 Jenis Komponen	7.500.000	20 Jenis Komponen	7.500.000	100 Jenis Komponen	37.500.000	Badan Kesbangpol	Sukamara
		1.19.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah langganan Koran		96 Eksemplar	16.000.000	96 Eksemplar	16.000.000	96 Eksemplar	16.000.000	96 Eksemplar	16.000.000	96 Eksemplar	16.000.000	480 Eksemplar	80.000.000	Badan Kesbangpol	Sukamara
		1.19.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Logistik Kantor		100 %	400.000	100 %	400.000	100 %	400.000	100 %	400.000	100 %	400.000	100 %	2.000.000	Badan Kesbangpol	Sukamara
		1.19.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan untuk rapat intern kantor		100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	150.000.000	Badan Kesbangpol	Sukamara
		1.19.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah		100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	100 %	1.500.000.000	Badan Kesbangpol	Sukamara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.19.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Kegiatan (Honor Daerah)	Jumlah Pegawai Kontrak / Honorer		6 Orang	126.000.000	6 Orang	126.000.000	6 Orang	126.000.000	6 Orang	126.000.000	6 Orang	126.000.000	30 Orang	630.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 01 . 20	Rapat - rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas kedalam daerah		100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	500.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Sarana dan prasarana aparatur Badan Kesbangpol	1.19.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur		100 %	1.518.000.000	100 %	318.000.000	100 %	418.000.000	100 %	418.000.000	100 %	393.000.000	100 %	3.065.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 02 . 03	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor		100 %	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 Ruang an	400.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 02 . 05	Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda dua diadakan		100 %	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 Unit	250.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		100 %	300.000.000	100 %	75.000.000	0	0	100 %	100.000.000	0	0	100 %	475.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang diadakan		100 %	200.000.000	0	0	100 %	175.000.000	0	0	100 %	150.000.000	100 %	525.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 02 . 10	Pengadaan Meubeler	Jumlah Sarana Mebel diadakan		100 %	75.000.000	0	0	0	0	100 %	75.000.000	0	0	100 %	150.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor		100 %	100.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	300.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan yang perlu pemeliharaan rutin		100 %	158.000.000	100 %	158.000.000	100 %	158.000.000	100 %	158.000.000	100 %	158.000.000	100 %	790.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah perlengkapan yang dipelihara		100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	175.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
Meningkatkan disiplin aparatur	Tingkat disiplin aparatur Badan Kesbangpol	1.19.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kepatuhan aparatur		100 %	30.000.000	100 %	60.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	60.000.000	100 %	210.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 03 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan nya	Jumlah pakaian dinas		100%	30.000.000	0	0	100%	30.000.000	0	0	100%	30.000.000	100%	90.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 03 . 04	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI		0	0	100%	30.000.000	0	0	0	0	100%	30.000.000	100%	60.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 03 . 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	Jumlah pakaian Khusus hari tertentu		0	0	100%	30.000.000	0	0	100%	30.000.000	0	0	100%	60.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	PNS di Badan Kesbangpol	1.19.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi di bidangnya		100 %	230.000.000	100 %	230.000.000	100 %	230.000.000	100 %	230.000.000	100 %	230.000.000	100 %	1.150.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat dan kursus		100 %	230.000.000	100 %	230.000.000	100 %	230.000.000	100 %	230.000.000	100 %	230.000.000	100 %	1.150.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan SOPD	Laporan capaian kinerja dan laporan keuangan Badan Kesbangpol	1.19.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan		100 %	142.000.000	100 %	112.000.000	100 %	112.000.000	100 %	112.000.000	100 %	112.000.000	100 %	590.000.000	Badan Kesbang pol	Suka mara
		1.19.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD	Jumlah Pelaporan Tahunan		1 Lapo ran	15.000.000	1 Lapo ran	15.000.000	1 Lapo ran	15.000.000	1 Lapo ran	15.000.000	1 Lapo ran	15.000.000	5 Lapo ran	75.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		1 Lapo ran	7.000.000	1 Lapo ran	7.000.000	1 Lapo ran	7.000.000	1 Lapo ran	7.000.000	1 Lapo ran	7.000.000	5 Lapo ran	35.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 06 . 05	Penyusunan Renstra SOPD	Jumlah Dokumen RENSTRA		2 Doku men	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Doku men	30.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 06 . 06	Penyusunan Renja SOPD	Jumlah dokumen RENJA		2 Doku men	20.000.000	2 Doku men	20.000.000	2 Doku men	20.000.000	2 Doku men	20.000.000	2 Doku men	20.000.000	10 Doku men	100.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 06 . 07	Penyusunan RKA-SOPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA		4 Doku men	30.000.000	4 Doku men	30.000.000	4 Doku men	30.000.000	4 Doku men	30.000.000	4 Doku men	30.000.000	20 Doku men	150.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 06 . 08	Penyusunan LAKIP	Jumlah laporan LAKIP		1 Lapo ran	20.000.000	1 Lapo ran	20.000.000	1 Lapo ran	20.000.000	1 Lapo ran	20.000.000	1 Lapo ran	20.000.000	5 Lapo ran	100.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 06 . 09	Penyusunan laporan TEPPA	Jumlah laporan TEPPA		12 Lapo ran	20.000.000	12 Lapo ran	20.000.000	12 Lapo ran	20.000.000	12 Lapo ran	20.000.000	12 Lapo ran	20.000.000	60 Lapo ran	20.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
Meningkat kan pengelolaan aset/barang milik daerah	Aset / barang milik daerah di Badan Kesbangpol	1.19.01 . 07	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Meningkatnya pengelolaan aset/barang milik daerah di Badan Kesbangpol		100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	75.000.000	Badan Kesbang pol	Suka mara
		1.19.01 . 07 . 01	Pengelolaan inventaris barang daerah	Jumlah Laporan Aset Badan Kesbangpol		2 Lapo ran	15.000.000	2 Lapo ran	15.000.000	2 Lapo ran	15.000.000	2 Lapo ran	15.000.000	2 Lapo ran	15.000.000	10 Lapo ran	75.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
Terciptanya dan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	1.19.01 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum		100 %	375.000.000	100 %	125.000.000	100 %	375.000.000	100 %	125.000.000	100 %	375.000.000	100 %	1.375.000.000	Badan Kesbang pol	Suka mara
		1.19.01 . 15 . 07	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini masyarakat		12 Kegiat an	125.000.000	12 Kegiat an	125.000.000	12 Kegiat an	125.000.000	12 Kegiat an	125.000.000	12 Kegiat an	125.000.000	60 Kegiat an	625.000.000	Badan Kesbang pol	Suka mara
		1.19.01 . 15 . 08	Sosialisasi Pemberdayaan Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Kantrantibmas	jumlah Aparatur desa dan Masyarakat se Kab. Sukamara yang mengikuti Sosialisasi deteksi dini		160 Orang	250.000.000	0	0	160 Orang	250.000.000	0	0	160 Orang	250.000.000	480 Orang	750.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
Terpeliharanya dan pencegahan kejahatan secara dini	Keamanan, ketentram an dan pencegah an kejahatan	1.19.01 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Meningkatnya kerjasama dengan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan		100 %	275.000.000	100 %	275.000.000	100 %	275.000.000	100 %	275.000.000	100 %	275.000.000	100 %	1.375.000.000	Badan Kesbang pol	Suka mara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.19.01 . 16 . 02	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah)	Jumlah Rakor Kominda dan monitoring ke Kecamatan dan Desa se Kab. Sukamara		12 Kali Rakor	200.000.000	12 Kali Rakor	200.000.000	12 Kali Rakor	200.000.000	12 Kali Rakor	200.000.000	12 Kali Rakor	200.000.000	60 Kali Rakor	1.000.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 16 . 06	Pengendalian dan Pengawasan Orang Asing	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Orang Asing		12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	60 Laporan	375.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
Mengembangkan wawasan kebangsaan di Kab Sukamara	Wawasan kebangsaan masyarakat di Kabupaten Sukamara	1.19.01 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat		100%	475.425.000	100%	650.000.000	100%	475.425.000	100%	650.000.000	100%	475.425.000	100%	2.726.275.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Hari sumpah Pemuda dan Ikrar Bersama Anak Bangsa tingkat Provinsi kalimantan Tengah		50 Orang	300.000.000	50 Orang	300.000.000	50 Orang	300.000.000	50 Orang	300.000.000	50 Orang	300.000.000	250 Orang	300.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 17 . 04	Sosialisasi Kesatuan Bangsa, Wasbang dan Negara Dalam Menegakkan Ideologi Negara	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi Wawasan kebangsaan bagi pelajar		500 Orang	175.425.000	600 Orang	350.000.000	500 Orang	175.425.000	600 Orang	350.000.000	500 Orang	175.425.000	2700 Orang	1.226.275.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
Menguatnya rasa cinta terhadap tanah air, bangsa dan negara Indonesia	Rasa persatuan dan kesatuan, cinta tanah air dan bela negara di kalangan masyarakat	1.19.01 . 18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan NKRI masyarakat di Kabupaten Sukamara		100%	549.350.000	100%	638.750.000	100%	288.750.000	100%	638.750.000	100%	288.750.000	100%	2.404.350.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 18 . 04	Pengembangan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Peserta yang mengikuti rapat/ koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan		100%	435.600.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	1.135.600.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 18 . 05	Peningkatan Pemahaman Bela Negara Bagi Pelajar	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi bela negara bagi pelajar (orang)		500 Orang	113.750.000	500 Orang	113.750.000	500 Orang	113.750.000	500 Orang	113.750.000	500 Orang	113.750.000	2500 Orang	568.750.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 18 . 06	Pendidikan Dasar Ketahanan nasional dan Bela Negara	Jumlah Peserta yang mengikuti Pendidikan dasar Ketahanan Nasional / Bela Negara		0	0	75 Orang	350.000.000	0	0	75 Orang	350.000.000	0	0	150 Orang	700.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
Meningkatnya wawasan dan pemahaman masyarakat politik yang sehat bagi masyarakat	Wawasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dalam bingkai demokrasi guna terciptanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan	1.19.01 . 23	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan berpolitik		100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	750.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	demokrasi yang berkualitas	1.19.01 . 21 . 04	Penyusunan data base partai politik	Tersedianya Data Base Partai Politik		0	0	1 Doku men	50.000.000	0	0	1 Doku men	50.000.000	0	0	1 Doku men	100.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 21 . 05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan		1 Laporan	30.000.000	2 Laporan	60.000.000	1 Laporan	30.000.000	2 Laporan	60.000.000	1 Laporan	30.000.000	7 Laporan	210.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 21 . 06	Sosialisasi Demokratisasi Kepada Pelajar	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan demokratisasi		500 Orang	200.000.000	500 Orang	200.000.000	500 Orang	200.000.000	500 Orang	200.000.000	500 Orang	200.000.000	2500 Orang	1.000.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 21 . 07	Pembinaan Partai Politik	Jumlah peserta dari Parpol yang mengikuti kegiatan		100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000	500 Orang	750.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
Pemantauan dan Pelaporan Potensi Konflik Sosial	Pelaporan Potensi Konflik Sosial	1.19.01 . 23	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	Pelaksanaan Pemantauan dan Pelaporan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kab. Sukamara		100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	750.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 23 . 01	Penanganan Gangguan Keamanan di Daerah	Jumlah laporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tiap Periode B04, B08 dan B12		3 Laporan	150.000.000	3 Laporan	150.000.000	3 Laporan	150.000.000	3 Laporan	150.000.000	3 Laporan	150.000.000	15 Laporan	750.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi hijau	Pemahaman masyarakat tentang ekonomi hijau	1.19.01 . 24	Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi hijau		100%	75.000.000	100%	250.000.000	100%	75.000.000	100%	250.000.000	100%	75.000.000	100%	725.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 24 . 01	Sosialisasi Ketahanan Ekonomi Kepada Masyarakat	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi		0	0	150 Orang	175.000.000	0	0	150 Orang	175.000.000	0	0	300 Orang	350.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 24 . 02	Monitoring dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan		1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	5 Laporan	375.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya daerah serta pemahaman masyarakat tentang organisasi kemasyarakatan/LSM dan OKP	Pemahaman masyarakat tentang organisasi kemasyarakatan / LSM	1.19.01 . 25	Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang organisasi kemasyarakatan/LSM dan OKP		100%	525.000.000	100%	375.000.000	100%	525.000.000	100%	525.000.000	100%	525.000.000	100%	2.475.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 25 . 01	Saresehan Peningkatan Peran Tokoh Agama Dalam Memperkuat Kerukunan Umat Beragama	Jumlah Peserta Saresehan FKUB		100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	300.000.000	100 Orang	150.000.000	500 Orang	900.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 25 . 02	Forum Komunikasi Pemuda Remaja Masjid, Gereja, Hindu kaharingan dan Buddha	Jumlah Peserta Forum Komunikasi		100 Orang	150.000.000			100 Orang	150.000.000			100 Orang	150.000.000	300 Orang	450.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 25 . 03	Penyempurnaan penguatan kelembagaan Ormas/LSM dan OKP	Jumlah peserta dari ormas/LSM dan OKP yang mengikuti kegiatan		100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000	500 Orang	750.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				penyempurnaan penguatan kelembagaan Ormas/LSM dan OKP															
		1.19.01 . 25 . 04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Laporan		1 Lapor an	75.000.000	1 Lapor an	75.000.000	1 Lapor an	75.000.000	1 Lapor an	75.000.000	1 Lapor an	75.000.000	5 Lapor an	375.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
Termonitornya Pelaksanaan Pileg / Pilpres / Pilkada di Kabupaten Sukamara	Pelaksanaan Pileg/Pilpres / Pilkada	1.19.01 . 26	Program Dukungan Kelancaran Pemilu	Pelaporan hasil Pelaksanaan Pileg/Pilpres / Pilkada		100%	450.000.000	0	0	100%	350.000.000	0	0	100%	450.000.000	100%	1.250.000.000	Badan Kesbang pol	Suka mara
		1.19.01 . 26 . 01	Posko Tim Koordinasi Pileg/Pilpres/Pilkada(Pilgub/ Pilbub)	Jumlah Orang dan Hari Pelaksanaan Posko Pemilu		100%	250.000.000			100%	200.000.000			100%	250.000.000	100%	700.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara
		1.19.01 . 26 . 02	Operasional tim koordinasi kelancaran penyelenggaraan Pileg / Pilpres / Pilkada (Pilgub/Pilbub) Monitoring Penyelenggaraan Pileg / Pilpres / Pilkada (Pilgub/Pilbub)	Jumlah Pemantauan Pemantauan Kelancaran Pemilu dan Laporan		100%	200.000.000			100%	150.000.000			100%	200.000.000	100%	550.000.000	Badan Kesbangpol	Suka mara

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara yang akan direncanakan menjadi tujuan dan sasaran RPJMD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukamara disajikan dalam tabel sebagai berikut dibawah ini :

Tabel 13
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
1.	Jumlah Kasus Kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA)	Kasus	32	40	33	31	39	35	178
2.	Persentase penurunan pelanggaran PERDA dan PERKADA	%	TAD	0,00	70	60	50	40	40
3.	Persentase pencapaian stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase pelaksanaan pemantauan dan pelaporan Tim Terpadu Penanganan Koinflik Sosial Kab. Sukamara	%	53,59	20	20	20	20	20	100
5.	Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan NKRI Masyarakat di Kabupaten Sukamara	%	92,14	22,85	26,57	12,01	26,57	12	100
6.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang organisasi kemasyarakatan / LSM dan OKP	%	TAD	18,75	18,75	18,75	25	18,75	100
7.	Termonitornya pelaksanaan Pileg / Pilpres / Pilkada di Kabupaten Sukamara	%	TAD	33,33	0	29,17	0	37,5	100

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara dalam 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis Perangkat Daerah ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara guna mendukung pencapaian sasaran.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) ini memuat Visi, Misi, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sukamara selama lima tahun kedepan adalah sebagai acuan kerja bagi seluruh bidang teknis di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara.

Renstra Perangkat Daerah disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN). Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah direncanakan.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023 yang disusun melalui berbagai tahapan persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah 2018 -2023. Tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Atas dasar itu, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam lima tahun;
5. Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara dilakukan melalui Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara setiap tahun dan realisasinya melalui RKA/DPA- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara setiap tahun;
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAPKIN sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara dalam mencapai sasaran Renstra Perangkat Daerah;
7. Dalam hal suatu pengendalian dan evaluasi terhadap Rensra Perangkat Daerah dan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Sukamara memerlukan perbaikan atau revisi, maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Sukamara dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

Sukamara, 9 April 2020

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sukamara,



SUTRISNO, S.Sos

Pembina Tk.I

NIP. 19690918 199012 1 003